



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Kota Metro sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman ekosistemnya serta keterbatasan daya dukungnya perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera, adil dan lestari;
 - b. bahwa agar upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna, perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di daerah, sehingga perlu dilakukan revisi dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499 Tahun 2019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO TAHUN 2022 - 2041.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kota adalah Kota Metro.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Walikota adalah Walikota Metro.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Sistem Pusat Pelayanan yang termasuk ke dalam rencana struktur ruang wilayah kota adalah wilayah kota dengan wilayah pelayanan dan jaringan mencakup prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota, meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
12. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
13. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
14. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
17. Sistem Jaringan Transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.
18. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
19. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
20. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
21. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

22. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
23. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
24. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
25. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
26. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk dan sarana pendukung lainnya.
27. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
28. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
29. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
30. Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
31. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
33. Jalur Evakuasi yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
34. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
35. Sistem jaringan drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan/lahan.
36. Jalur pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
37. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
38. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

39. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
40. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
41. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
42. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan tanam pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan.
43. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.
44. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
45. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
48. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
49. Kawasan Perumahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
50. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
51. Kawasan Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
52. Kawasan Peribadatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.

53. Kawasan Pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal.
54. Kawasan Kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani.
55. Kawasan Olahraga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
56. Kawasan Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.
57. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
58. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
59. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
60. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
61. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
62. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
63. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
64. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
65. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
66. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kota Metro meliputi :

- a. Lingkup wilayah; dan
- b. Lingkup materi.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah
Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, perairan, serta wilayah udara dengan total luas wilayah 7.321,40 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu koma empat nol) hektar dengan koordinat antara 5°6'-5°10'LS dan 105°17' - 105°21' BT.
- (2) Batas-batas wilayah kota meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Metro Pusat;
 - b. Kecamatan Metro Timur;
 - c. Kecamatan Metro Barat;
 - d. Kecamatan Metro Utara; dan
 - e. Kecamatan Metro Selatan.
- (4) Wilayah perencanaan RTRW Kota Metro dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Perencanaan RDTR selanjutnya disingkat menjadi WP, yang meliputi:
 - a. WP I yang meliputi Kecamatan Metro Pusat dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, pusat pelayanan pendidikan, simpul transportasi darat, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan wisata buatan.
 - b. WP II yang meliputi Kecamatan Metro Timur memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi, kawasan perumahan dan wisata buatan.
 - c. WP III yang meliputi Kecamatan Metro Barat memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi, kawasan perumahan dan wisata buatan.
 - d. WP IV yang meliputi Kecamatan Metro Utara memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pengembangan pertanian, industri menengah, kawasan transportasi, kawasan perumahan dan wisata alam/buatan.
 - e. WP V yang meliputi Kecamatan Metro Selatan memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, industri kecil dan mikro, pusat pengembangan pertanian, dan wisata alam/buatan.
- (5) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (6) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Lingkup Materi
Pasal 4

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
- d. Kawasan Strategis Kota;
- e. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; dan
- f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Metro adalah "Mewujudkan Ruang Wilayah Kota Metro Sebagai Kota Berpendidikan, Berbudaya, Sehat, Sejahtera, Produktif yang Terintegrasi dan Berkelanjutan".

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Metro, meliputi :

- a. peningkatan produktivitas kota melalui peningkatan standar pelayanan perkotaan yang bersinergis untuk mendukung kota pendidikan;
- b. peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan dan pemantapan kawasan Pendidikan;
- c. pengembangan penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan;
- d. peningkatan kualitas kesehatan dengan pemerataan pelayanan kesehatan menuju masyarakat sejahtera melalui optimalisasi akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (sarana, prasarana, dan SDM);
- e. pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa maupun jangkauan kualitas pelayanan prasarana kota guna meningkatkan produktivitas yang berdaya saing regional dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Kota Metro sebagai pusat kegiatan wilayah;
- f. pengendalian dan intensifikasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kota Metro; dan
- g. peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu dengan sistem regional yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah
Pasal 7

Untuk mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka disusun strategi penataan ruang, meliputi:

- a. Strategi peningkatan produktivitas kota melalui peningkatan standar pelayanan perkotaan yang bersinergis untuk mendukung kota pendidikan meliputi:
 1. Meningkatkan fungsi jalan yang mengakses tiap-tiap wilayah yang menuju kawasan pendidikan;
 2. Menyediakan moda transportasi massal yang aman, nyaman dan efisien menuju kawasan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Metro dan sekitarnya;

4. Mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan tumpah ke jalan serta keberadaan sektor informal/pedagang kaki lima (PKL);
 5. Mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier;
 6. Menetapkan dan mengintensifkan kawasan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional di pusat kota sebagai kawasan strategis kota; dan
 7. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas terminal penumpang dan terminal barang yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi.
- f. Strategi pengendalian dan intensifikasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Metro meliputi:
1. Membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat;
 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan yang dapat merusak kawasan pertanian;
 3. Menerapkan penggunaan teknologi tepat guna peningkatan hasil produksi yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian; dan
 4. Meningkatkan fungsi sistem irigasi teknis.
- g. Strategi peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu dengan sistem regional yang berwawasan lingkungan meliputi:
1. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 2. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung menimbulkan perubahan secara fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 3. Mengembangkan RTH untuk mencapai luasan 20% RTH publik dan 10% RTH privat;
 4. Mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada setiap perumahan dan permukiman;
 5. Menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan pengembangan rumah susun sehat;
 6. Meningkatkan kualitas jaringan jalan eksisting, mendukung pembangunan jalan baru pada kawasan pinggiran kota dan pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan semua wilayah kota untuk mendukung terwujudnya keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 7. Membangun dan meningkatkan prasarana terminal barang dan penumpang yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi lokal dan regional;
 8. Mengembangkan dan meningkatkan sistem transportasi antar wilayah yang terstruktur;
 9. Mengembangkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan energi kelistrikan dan sarana penerangan jalan umum;
 10. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah;
 11. Meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan sumber daya air serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air; dan
 12. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Metro, meliputi:
 - a. Sistem Pusat Pelayanan;
 - b. Sistem Jaringan Transportasi;
 - c. Sistem Jaringan Energi;
 - d. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - f. Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Metro yang berfungsi sebagai:
 - a. pusat pemerintahan;
 - b. pusat perkantoran;
 - c. pusat pelayanan pendidikan;
 - d. pusat pelayanan kesehatan; dan
 - e. pusat pelayanan perdagangan dan jasa.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan wisata buatan;
 - b. sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan wisata buatan; dan
 - c. sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan wisata buatan.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat;
 - b. Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan;
 - c. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara;
 - d. Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara; dan
 - e. Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.
- (5) Rencana Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Jalan; dan
 - b. Sistem Jaringan Kereta Api.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Terminal Penumpang; dan
 - c. Terminal Barang.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor;
 - b. Jalan Lokal; dan
 - c. Jalan Lingkungan.
- (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) meliputi:
 1. Jalan Sudirman;
 2. Batas Kota Metro-Gedong Dalam; dan
 3. Jalan AH. Nasution.
 - b. Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2), meliputi:
 1. Jalan Soekarno Hatta; dan
 2. Jalan Budi Utomo.
 - c. Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3), meliputi:
 1. Jalan Brigjen Katamso;
 2. Jalan Ahmad Yani;
 3. Jalan Metro-Tanjung Kari;
 4. Jalan Patimura; dan
 5. Jalan Veteran.
 - d. Jalan Kolektor Sekunder, meliputi:
 1. Jalan Ade Irma Suryani;
 2. Jalan Alamsyah RPN;
 3. Jalan Amir Mahmud;
 4. Jalan Basuki Rahmat;
 5. Jalan Dewi Sartika;
 6. Jalan Diponegoro;
 7. Jalan Dr. Soetomo;
 8. Jalan Gatot Subroto;
 9. Jalan Hassanudin;
 10. Jalan Imam Bonjol;
 11. Jalan Jendral Suprpto;
 12. Jalan Ki. Hajar Dewantara;
 13. Jalan Mayjen S. Parman;
 14. Jalan Proklamasi;
 15. Jalan RA. Kartini;
 16. Jalan Raden Intan;
 17. Jalan Sosro Sudarmo;

18. Jalan Stadion;
 19. Jalan Wolter Monginsidi;
 20. Jalan Wr. Supratman;
 21. Jalan Yos Sudarso;
 22. Jalan Z.A. Pagar Alam;
 23. Jalan Nanas;
 24. Jalan Soekarno-Hatta II; dan
 25. Jalan Sutan Syahrir.
- (4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer, meliputi:
 1. Jalan Way Seputih;
 2. Jalan Sutiyoso;
 3. Jalan Mayjend Ryachudu;
 4. Jalan Mr. Gele Harun; dan
 5. Jalan Yos Sudarso.
 - b. Jalan Lokal Sekunder, meliputi:
 1. Jalan Abri;
 2. Jalan Adipati Raya;
 3. Jalan Agus Salim;
 4. Jalan Arwana;
 5. Jalan Batang Hari;
 6. Jalan Belida;
 7. Jalan Belimbing;
 8. Jalan Beruang;
 9. Jalan Cendrawasih;
 10. Jalan Cut Nyak Dien;
 11. Jalan Durian;
 12. Jalan FKPPi SMAN 6;
 13. Jalan FKPPi/Husodo;
 14. Jalan Garuda;
 15. Jalan Gelatik;
 16. Jalan Gn. Lawu;
 17. Jalan Gori;
 18. Jalan Ikan Mas;
 19. Jalan Inspeksi;
 20. Jalan Jawa;
 21. Jalan Kecapiring;
 22. Jalan Kenanga;
 23. Jalan Kerapu;
 24. Jalan KH. Arsyad;
 25. Jalan Khair Bras;
 26. Jalan Krakatau;
 27. Jalan Kutilang;
 28. Jalan Leci;
 29. Jalan Lele;
 30. Jalan Manyar;
 31. Jalan Mentawai;
 32. Jalan Merpati;
 33. Jalan Mujair;
 34. Jalan Nangka;
 35. Jalan Nias;
 36. Jalan Nuri;
 37. Jalan Nusantara;
 38. Jalan Pala;
 39. Jalan Pemuda;

40. Jalan Piagam Jakarta;
 41. Jalan Rajabasa;
 42. Jalan Rajawali;
 43. Jalan Sadewo;
 44. Jalan Sakura;
 45. Jalan Salak;
 46. Jalan Satelit 1;
 47. Jalan Semangka;
 48. Jalan Semeru;
 49. Jalan Seminung;
 50. Jalan Sulawesi;
 51. Jalan Sumbawa;
 52. Jalan Tawes;
 53. Jalan Tiram;
 54. Jalan Tongkol;
 55. Jalan TPA;
 56. Jalan Walet;
 57. Jalan Wijaya Kusuma;
 58. Jalan Gajah Yana;
 59. Jalan Kili Suci; dan
 60. Jalan Komodo.
- (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lingkungan Primer tersebar pada seluruh wilayah kota.
 - (6) Terminal Penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat yaitu Terminal Induk Mulyojati;
 - b. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat.
 - (7) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur dan rencana pengembangan terminal barang berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Kereta Api
Pasal 12

- (1) Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, yaitu Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rejosari–Metro; dan
 - b. Metro–Sukadana.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Energi
Pasal 13

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Jaringan infrastuktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan transmisi Tegineneng menuju Metro;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik yang terdiri atas:
 1. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) melalui seluruh jalan kolektor dan jalan lokal; dan

2. Saluran udara tegangan rendah (SUTR) melalui seluruh wilayah kota.
- c. gardu listrik terdapat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.
- (3) Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa serat optik yang terdapat di seluruh kota mengikuti jaringan jalan kota.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa optimasi seluler dan lokasi sentral telekomunikasi di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan bergerak seluler yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu secara kolektif antar operator yang berada di seluruh kecamatan.
- (5) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 15

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air yang meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi (D.I) yaitu D.I Way Sekampung.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir yang terdapat di Sungai Way Sekampung, Sungai Way Batanghari, Sungai Way Bunut dan Sungai Way Raman.
- (4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana pengembangan embung yang terdapat di setiap kecamatan kota.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Perkotaan
Pasal 16

- (1) Infrastruktur Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana;
 - f. Sistem Drainase; dan
 - g. Jalur Sepeda; dan
 - h. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan perpipaan terdiri atas:
 1. Unit air baku berupa *Water Treatment Plant* (WTP) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;
 2. Unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air yang terdapat di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;
 3. Jaringan produksi yang melewati Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur.
 4. Unit distribusi tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.
 - b. Bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa yang tersebar di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat dan Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, dan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.
 - b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang tersebar di seluruh wilayah kota.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat.
- (5) Sistem Jaringan Persampahan Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) yang terdapat di Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan;
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar diseluruh Kelurahan Kota Metro; dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.

- (6) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana meliputi jalur penyelamatan, meliputi:
 1. Jalan Abri;
 2. Jalan AH. Nasution;
 3. Jalan Arwana;
 4. Jalan Budi Utomo;
 5. Jalan Cempaka;
 6. Jalan Dr. Soetomo;
 7. Jalan Imam Bonjol;
 8. Jalan Kacer;
 9. Jalan Kenanga;
 10. Jalan Ki Hajar Dewantara;
 11. Jalan Krakatau;
 12. Jalan Mayjend. Ryachudu;
 13. Jalan Mujair;
 14. Jalan Patimura;
 15. Jalan Salak;
 16. Jalan Seluang;
 17. Jalan Subur;
 18. Jalan Tengiri;
 19. Jalan Tongkol;
 20. Jalan Wijaya Kusuma;
 21. Jalan WR. Supratman;
 22. Jalan Yos Sudarso;
 23. Jalan Adipati Raya;
 24. Jalan Madukoro;
 25. Jalan Stadion Tejosari; dan
 26. Jalan Tenggara.
 - b. Tempat evakuasi bencana yang tersebar di seluruh lapangan wilayah Kota Metro.
- (7) Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Jaringan drainase primer, meliputi:
 1. Sungai Way Raman dan Anak Sungai Way Raman;
 2. Sungai Way Sekampung dan Anak Sungai Way Sekampung;
 3. Sungai Way Bunut dan Anak Sungai Way Bunut; dan
 4. Sungai Way Batanghari dan Anak Sungai Way Batanghari.
 - b. Jaringan drainase sekunder, meliputi setiap ruas jalan kolektor dan lokal yang berada di Kota Metro; dan
 - c. Jaringan drainase tersier, meliputi setiap ruas jalan lingkungan yang berada di Kota Metro.
- (8) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Jalan Mayjen Ryacudu;
 - b. Jalan Sudirman;
 - c. Jalan Mr. Gele Harun;
 - d. Jalan AH. Nasution;
 - e. Jalan Alamsyah RPN;
 - f. Jalan Agus Salim
 - g. Jalan Ade Irma Suryani;
 - h. Jalan Z.A Pagar Alam;
 - i. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - j. Jalan Ki Hajar Dewantara;
 - k. Jalan Sutiyo;
 - l. Jalan Sosro Sudarmo;
 - m. Jalan Raden Intan; dan
 - n. Jalan Diponegoro.

- (9) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- Jalan Diponegoro;
 - Jalan Raden Intan;
 - Jalan Sutiyoso;
 - Jalan Z.A. Pagar Alam;
 - Jalan AH. Nasution;
 - Jalan Mr. Gele Harun;
 - Jalan Ki Hajar Dewantara;
 - Jalan Jendral Ahmad Yani;
 - Jalan Alamsyah RPN;
 - Jalan Jendral Sudirman;
 - Jalan Mayjend Ryachudu;
 - Jalan Soekarno-Hatta;
 - Jalan Imam Bonjol;
 - Jalan Sutan Syahrir;
 - Jalan Hasanudin;
 - Jalan Yos Sudarso; dan
 - Jalan Wolter Monginsidi.
- (10) Rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang meliputi:
- Kawasan Lindung; dan
 - Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 18

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi :

- Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 19

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan kode PS seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektar meliputi sempadan sungai, danau atau waduk yang tersebar di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Sumberasri Bantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur dan Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur.

Paragraf 2
Ruang Terbuka Hijau
Pasal 20

- (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar, terdiri atas:
 - a. Rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - e. Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode RTH-1 berada di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.
- (3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode RTH-2 berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, dan Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.
- (4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode RTH-3 tersebar di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.
- (5) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode RTH-5 tersebar di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.
- (6) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode RTH-7 yang tersebar di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 21

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Pertanian dengan kode P;

- b. Kawasan Perikanan dengan kode IK-2;
- c. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- d. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- e. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- f. Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- g. Kawasan Perkantoran dengan kode KT;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Pertanian
Pasal 22

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan kode P seluas kurang lebih 3.573 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode P-1 seluas kurang lebih 3.524 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat) hektar yang tersebar diseluruh wilayah Kota Metro, meliputi:
 - a. Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
 - b. Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat;
 - c. Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat;
 - d. Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat;
 - e. Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat;
 - f. Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat;
 - g. Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur;
 - h. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara;
 - i. Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan;
 - j. Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan;
 - k. Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat;
 - l. Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat;
 - m. Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat;
 - n. Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara;
 - o. Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara;
 - p. Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;
 - q. Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan;
 - r. Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur;
 - s. Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur;
 - t. Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur;
 - u. Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat; dan
 - v. Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar ditetapkan sebagai Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan (KP2B) digambarkan dalam bentuk pertampalan, terdapat di:
 - a. Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
 - b. Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat;
 - c. Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat;
 - d. Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat;
 - e. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara;
 - f. Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan;
 - g. Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan;
 - h. Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat;
 - i. Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat;

- j. Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara;
 - k. Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara
 - l. Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;
 - m. Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan;
 - n. Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur;
 - o. Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur;
 - p. Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur; dan
 - q. Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode P-2 seluas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar yang tersebar di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, dan Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode P-4 berupa sentra kawasan pengembangan peternakan kondisi saat ini seluas paling sedikit 3 (tiga) hektar terdapat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, dan arahan pengembangan kegiatan peternakan skala kecil lainnya tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan Perikanan
Pasal 23

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 kondisi saat ini seluas paling sedikit 2 (dua) hektar terdapat di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, dan arahan pengembangan kegiatan perikanan skala kecil lainnya tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 24

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan kode KPI seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar yang berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara, dan arahan pengembangan kegiatan peruntukan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Pariwisata
Pasal 25

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan kode W kondisi saat ini seluas paling sedikit 4 (empat) hektar yang berada di Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Barat, dan arahan pengembangan kegiatan pariwisata lainnya tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Permukiman
Pasal 26

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan kode PM seluas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. Kawasan perumahan dengan kode R;
 - b. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS; dan
 - c. Kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode R seluas kurang lebih 3.213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) hektar tersebar diseluruh wilayah kota.

- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode FUS seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar berupa kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, dan kawasan peribadatan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Metro.
- (4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode IR seluas kurang lebih 4 (empat) hektar berupa gardu listrik di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.

Paragraf 6
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pasal 27

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan kode K seluas kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hektar yang berada di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.

Paragraf 7
Kawasan Perkantoran
Pasal 28

Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dengan kode KT seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar yang berada di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi
Pasal 29

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dengan kode TR berupa terminal tipe B seluas kurang lebih 1 (satu) hektar terdapat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 30

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i dengan kode HK seluas kurang lebih 5 (lima) hektar yang terdapat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat dan Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat.
- (2) Rincian fasilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0411 KM berada di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat;
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) 01 berada di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur;
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) 02 berada di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara;
 - d. Komando Rayon Militer (Koramil) 03 berada di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan;
 - e. Kepolisian Resort (POLRES) berada di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat; dan
 - f. Polisi Sektor (Polsek) yang tersebar di setiap Kecamatan Kota Metro.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KOTA
Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Kota
Pasal 31

- (1) Kawasan Strategis Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya.
- (2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan strategis perdagangan dan jasa pusat kota ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur, untuk arahan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. Kawasan strategis peruntukan industri berada di Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan industri kecil dan mikro lainnya tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. Kawasan strategis pariwisata ditetapkan di Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan pariwisata lainnya dapat tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Pendidikan berada di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, dan kegiatan pendidikan lainnya tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. Kawasan Strategis Kesehatan berada di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan kegiatan kesehatan lainnya tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. Kawasan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS), Menara Masjid Taqwa dan Rumah Bersalin Santa Maria yang berada di Kecamatan Metro Pusat.
- (4) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (5) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota
Pasal 32

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan strategis perdagangan dan jasa pusat kota ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur, untuk arahan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, adalah mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa skala kota yang dapat melayani penduduk kota dan wilayah sekitarnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis peruntukan industri berada di Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan industri kecil dan mikro lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, adalah mewujudkan kawasan peruntukan industri yang terpusat sehingga dapat memperkuat pondasi perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi.

- (3) Tujuan pengembangan Kawasan strategis pariwisata ditetapkan di Kecamatan Metro Barat, dan Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan pariwisata lainnya dapat tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, adalah mewujudkan pengembangan kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi sumber daya alam maupun buatan serta mendukung pengembangan agrowisata untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata kota.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya meliputi Kawasan Strategis Pendidikan berada di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, dan kegiatan pendidikan lainnya tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan Strategis Kesehatan berada di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan kegiatan kesehatan lainnya tersebar di seluruh kecamatan; dan Kawasan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS), Menara Masjid Taqwa dan Rumah Bersalin Santa Maria yang berada di Kecamatan Metro Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), adalah memperkuat kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan standar pelayanan perkotaan yang bersinergis untuk mendukung kota pendidikan dan pemerataan pelayanan kesehatan menuju masyarakat sejahtera melalui optimalisasi akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota
Pasal 33

- (1) Arahan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa pusat kota ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur, untuk arahan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa pada setiap pusat pelayanan;
 - b. Penataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki; dan
 - c. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan komersil, dan pengembangan sistem parkir.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Penetapan dan pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan; dan
 - b. Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan di Kecamatan Metro Utara, untuk kawasan peruntukan industri kecil dan mikro lainnya tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan pariwisata ditetapkan di Kecamatan Metro Barat, dan Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan pariwisata lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata alam dan non alam (buatan);
 - b. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
 - c. pengembangan akomodasi wisata, seperti hotel, penginapan, bank, *money changer*, biro perjalanan, rumah makan/*restaurant*, pusat-pusat perdagangan dan penunjang lainnya;
 - d. melakukan promosi wisata kaitannya dengan obyek wisata yang akan dikembangkan di Kota Metro, maupun obyek-obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro;

- e. pengembangan paket-paket wisata yang ada di Kota Metro dan obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro;
 - f. parade budaya Kota Metro dan sekitarnya dengan rute sepanjang jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder; dan
 - g. perencanaan dan pembangunan 3 (tiga) destinasi wisata potensial di Kota Metro yaitu revitalisasi Taman Merdeka, penataan Taman Wisata Bumi Perkemahan Sumbersari Bantul, perencanaan dan pembangunan destinasi wisata sekitar Dam Raman.
- (4) Arahannya pengembangan Kawasan Strategis Pendidikan berada di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, dan kegiatan pendidikan lainnya tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan Strategis Kesehatan berada di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan kegiatan kesehatan lainnya tersebar di seluruh kecamatan; dan Kawasan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS), Menara Masjid Taqwa dan Rumah Bersalin Santa Maria yang berada di Kecamatan Metro Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), terdiri atas:
- a. Pengembangan dengan kriteria kawasan pendidikan tinggi berbasis potensi lokal dengan skala pelayanan kota dan regional;
 - b. Penetapan dan pengembangan zona pendidikan tinggi;
 - c. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan Pendidikan; dan
 - d. Peningkatan kualitas kesehatan dengan pemerataan pelayanan kesehatan menuju masyarakat sejahtera melalui optimalisasi akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (sarana, prasarana, dan SDM);

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

Arahannya Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

- a. Ketentuan KKPR;
- b. Indikasi program utama; dan
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
Pasal 35

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Pasal 36

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:
 - a. Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
 1. Program Utama;

2. Lokasi;
 3. Sumber Pendanaan;
 4. Instansi Pelaksana; dan
 5. Waktu Pelaksanaan.
- b. Indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama:
1. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 2. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 3. perwujudan kawasan strategis wilayah kota.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. Perwujudan rencana kawasan strategis wilayah kota.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. Investasi swasta; dan
 - e. Kerjasama pembiayaan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah kota;
 - d. Dunia usaha;
 - e. Kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (5) Kerjasama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan pada ayat (4) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:
- a. Perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. Perwujudan pola ruang wilayah kota;
 - c. Perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi penataan pusat-pusat kegiatan perkotaan.
 - b. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) peningkatan jalan kolektor;
 - b) peningkatan jalan lokal;
 - c) peningkatan jalan lingkungan;
 - d) rencana pengembangan jalur lingkar kota; dan
 - e) pengembangan terminal penumpang dan terminal barang.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi pengembangan jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api antarkota.

- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) Penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 - b) Penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar danau/waduk; dan
 - c) Pengembangan RTH.
 2. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) Pengembangan taman kota;
 - b) Pengembangan taman kecamatan;
 - c) Pengembangan taman kecamatan baru;
 - d) Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau;
 - e) Penyediaan taman RW;
 - f) Penyediaan pemakaman baru;
 - g) Pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH (sempadan sungai, sempadan jalan dan irigasi);
 - h) Penyediaan RTH kawasan perumahan;
 - i) Penyediaan RTH kawasan peruntukan industri; dan
 - j) Penyediaan RTH pada Kawasan Pertanian yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.
 - b. Perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.
 2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
 - a) pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar;
 - b) pengembangan budi daya perikanan pola mina padi; dan
 - c) optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan.
 3. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a) pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI); dan
 - b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri.
 4. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) penyusunan profil kawasan pariwisata;
 - b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan
 - c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
 - d) pengembangan kawasan pariwisata baru yang tersebar di seluruh kecamatan.
 5. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) penataan kawasan perumahan;
 - b) peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman;
 - d) pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan dan/atau perumahan komersil;
 - e) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - f) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.
 6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional; dan

- c) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan jasa.
 7. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan perkantoran.
 8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi.
 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Pasal 38

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota;
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi penataan pusat-pusat kegiatan perkotaan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) peningkatan jalan kolektor;
 - b) peningkatan jalan lokal;
 - c) peningkatan jalan lingkungan;
 - d) rencana pengembangan jalur lingkaran kota; dan
 - e) pengembangan terminal penumpang dan terminal barang.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi pengembangan jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api antarkota.
 - c. perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 1. pengembangan jaringan transmisi listrik berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 Kv;
 2. pengembangan SUTM dan SUTR; dan
 3. pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik.
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan tetap berupa optimasi jaringan serat optik;
 2. perwujudan infrastruktur jaringan tetap berupa optimasi seluler dan lokasi sentral telekomunikasi; dan
 3. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan bergerak seluler berupa BTS; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak satelit.
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 1. pemeliharaan jaringan irigasi (DI);
 2. pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI);
 3. pengembangan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir; dan
 4. pembangunan embung.
 - f. perwujudan infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a) pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional;
 - b) pengembangan unit air baku;

- c) pengembangan unit produksi;
 - d) pengembangan jaringan produksi;
 - e) pengembangan unit distribusi;
 - f) peningkatan kinerja penyelenggaraan penyediaan air bersih perpipaan; dan
 - g) pemeliharaan sumur pompa.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - b) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik berupa sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual; dan
 - c) revitalisasi dan peningkatan pengolahan IPLT di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.
 3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah B3.
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS);
 - b) pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - c) pengembangan sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R).
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyediaan ruang evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan rambu-rambu (*signage*) jalur evakuasi dan papan informasi bencana.
 6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 - b) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pengembangan jaringan drainase tersier.
 7. perwujudan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda berupa pengembangan sistem jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda di kawasan cepat tumbuh dan kawasan pariwisata.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar danau/waduk; dan
 - c) pengembangan RTH.
 2. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) pengembangan taman kota;
 - b) pengembangan taman kecamatan;
 - c) pengembangan taman kecamatan baru;
 - d) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau;
 - e) penyediaan taman RW Baru;
 - f) penyediaan pemakaman baru;
 - g) pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH (sempadan sungai, sempadan jalan, irigasi);
 - h) penyediaan RTH kawasan perumahan;
 - i) penyediaan RTH kawasan peruntukan industri; dan
 - j) penyediaan RTH pada kawasan pertanian yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.

- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.
 2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
 - a) pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar;
 - b) pengembangan budi daya perikanan pola mina padi.; dan
 - c) optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan.
 3. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a) pengembangan kawasan peruntukan Industri skala kecil dan menengah; dan
 - b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri.
 4. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) penyusunan profil kawasan pariwisata;
 - b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan
 - c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
 - d) pengembangan kawasan pariwisata baru yang tersebar di seluruh kecamatan.
 5. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) penataan kawasan perumahan;
 - b) peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan
 - c) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman.
 - d) pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan dan/atau perumahan komersil;
 - e) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - f) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.
 6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional; dan
 - c) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan jasa.
 7. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan perkantoran.
 8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi.
 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. penataan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya.

Pasal 39

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota;
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi penataan pusat-pusat kegiatan perkotaan.

5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyediaan ruang evakuasi bencana; dan
 - c) pemasangan rambu-rambu (*signage*) jalur evakuasi dan papan informasi bencana.
 6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 - b) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - c) pengembangan jaringan drainase tersier.
 7. perwujudan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda berupa pengembangan sistem jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda di kawasan cepat tumbuh dan kawasan pariwisata.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar danau/waduk; dan
 - c) pengembangan RTH.
 2. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) pengembangan taman kota;
 - b) pengembangan taman kecamatan;
 - c) pengembangan taman kecamatan baru;
 - d) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau;
 - e) penyediaan taman RW Baru;
 - f) penyediaan pemakaman baru;
 - g) pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH (sempadan sungai, sempadan jalan, irigasi);
 - h) penyediaan RTH kawasan perumahan;
 - i) penyediaan RTH kawasan peruntukan industri; dan
 - j) Penyediaan RTH pada Kawasan Pertanian yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.
 - b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.
 2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
 - a) pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar;
 - b) pengembangan budi daya perikanan pola mina padi; dan
 - c) optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan.
 3. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a) pengembangan kawasan peruntukan Industri skala kecil dan menengah; dan
 - b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri.
 4. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) penyusunan profil kawasan pariwisata;
 - b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan
 - c) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
 - d) pengembangan kawasan pariwisata baru yang tersebar diseluruh kecamatan.

5. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) penataan kawasan perumahan;
 - b) peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan
 - c) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman.
 - d) pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan dan/atau perumahan komersil;
 - e) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - f) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.
 6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional; dan
 - c) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan jasa.
 7. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan perkantoran.
 8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi.
 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. penataan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi;
- b. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- c. Arahan sanksi; dan
- d. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Pasal 43
Paragraf 1
Umum

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya; dan
 - c. ketentuan khusus.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 45

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan kota;
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan kota;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan pelayanan olahraga;
 4. kegiatan pelayanan transportasi;
 5. kegiatan pelayanan pendidikan tinggi;
 6. kegiatan pelayanan kesehatan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 8. kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada pusat pelayanan kota berupa kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pusat pelayanan kota;
 - d. Penyediaan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. Ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal; dan
 - f. Penyediaan prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. terpenuhinya sanitasi, pengelolaan limbah, jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala sub pusat pelayanan kota;
 3. kegiatan pelayanan olahraga skala sub pusat pelayanan kota;
 4. kegiatan pelayanan transportasi;
 5. kegiatan pelayanan pendidikan;
 6. kegiatan pelayanan kesehatan skala sub pusat pelayanan kota; dan
 7. kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala sub pusat pelayanan kota.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi yang melayani sub wilayah kota;

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Sub Pusat Pelayanan Kota;
 - d. penyediaan RTH paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sub pusat pelayanan kota meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 - 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang; dan
 - 3. prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan untuk pusat pelayanan lingkungan meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan permukiman kota;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada pusat pelayanan lingkungan berupa kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada pusat lingkungan, meliputi kegiatan pertambangan dan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pusat pelayanan lingkungan;
 - d. penyediaan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat lingkungan meliputi kebutuhan dasar berupa listrik, sanitasi, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah, limbah serta jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal barang.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum yang berupa jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, dan jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan primer meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jalur hijau, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda;
 - b) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan

- c) ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung di sepanjang sisi jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang disabilitas, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 4 (empat), KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. fasilitas utama terdiri atas: jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket, fasilitas dan tempat bongkar muat barang, fasilitas penyimpanan barang, fasilitas pergudangan, fasilitas pengepakan barang dan fasilitas penimbangan;
 2. fasilitas penunjang terdiri dari: pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran; dan
 3. fasilitas umum terdiri atas: toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan, fasilitas kebersihan, fasilitas perdagangan, industri, dan pertokoan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api;
 2. kawasan disekitar sistem jaringan kereta api dilengkapi dengan RTH; dan
 3. pemanfaatan garis sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 3. permukiman eksisting yang ada pada garis sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap rel kereta api; dan
 4. pemanfaatan garis sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan
 2. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi untuk penyaluran tenaga listrik.
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau (RTH), dan kegiatan pertanian tanaman pangan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa sarana prasarana penunjang, fasilitas pendukung operasional, dan pemanfaatan ruang yang berada di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik yang berada di dalam daerah bahaya.
4. prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau (RTH), dan kegiatan pertanian tanaman pangan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan jaringan pipa gas dan pemanfaatan ruang yang berada di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan distribusi tenaga listrik.
 4. ketentuan intensitas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 6. ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. pengembangan jaringan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH); dan
 3. pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS;
2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika;
3. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e berupa ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air.
- (3) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan irigasi;
 2. pembangunan jalan inspeksi;
 3. pemasangan papan pengumuman/ larangan;
 4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 5. pondasi jembatan/jalan; dan
 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 3. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 4. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 5. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 6. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. pengembangan jaringan pipa gas;
 8. pembangunan jembatan dan jalan berikut sarana pendukungnya, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi, dan sistem pengembangan jalan; dan
 9. pengembangan RTH eksisting.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase;
 - d. ketentuan intensitas untuk sistem jaringan irigasi, terdiri atas KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan KDH minimal 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi, sarana dan prasarana penunjang sistem pengendalian banjir, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, jalur pipa gas dan air minum.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung bangunan sumber daya air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 2. bangunan dan tanaman penunjang pengamanan bangunan sumber daya air; dan
 3. Pengembangan pertanian dan RTH.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi bangunan sumber daya air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari Bangunan Sumber Daya Air.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10% (sepuluh) persen, KLB 1 (satu), KDH 90% (sembilan puluh) persen sesuai dengan ketentuan bangunan yang berlaku.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase;
 - g. ketentuan umum zonasi di sekitar jalur sepeda; dan
 - h. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya di atas jaringan sistem penyediaan air minum yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. kegiatan penyediaan air minum;
 3. bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum; dan
 4. pembangunan SPAM.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan sistem penyediaan air minum; dan
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem penyediaan air minum;
 - 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem penyediaan air minum;
 - 3. kegiatan yang tidak terkait dengan penyediaan air minum;
 - 4. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu jaringan sistem penyediaan air minum; dan
 - 5. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan sistem penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 - 2. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 - 3. bangunan pendukung IPAL; dan
 - 4. pembangunan IPLT.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah; dan
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 - 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah;
 - 3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah;
 - 4. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah;
 - 5. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 - 6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL.
 - d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengelolaan air limbah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa penyediaan TPS Limbah B3 di sekitar sumber penghasil Limbah B3;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa bak pengumpul limbah B3 dari sumber penghasil limbah B3, tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap; dan

- e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terdiri atas:
 1. lokasi penyimpanan limbah B3 dari sumber penghasil limbah B3 merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan dari sumber penghasil limbah B3 dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama; dan
 3. rincian persyaratan lokasi dan fasilitas pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari sumber penghasil limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. Kegiatan pertanian non-pangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA; dan
 2. Kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 30% (tiga puluh persen), KDB maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan KLB maksimal sebesar 2,1 (dua koma satu)
 - e. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang.
 - f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK, alat pemadam kebakaran atau pengembangan jaringan *fire hydrant* guna pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. jaringan sistem pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan

- d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjarang sampah.
- (8) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan RTH;
 - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki; dan
 - prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pejalan kaki yaitu fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel, lampu penerangan dan sarana pelengkap jalur *pedestrian*.
- (9) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan RTH, sarana dan prasarana penunjang jalur sepeda;
 - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana jalur sepeda;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur sepeda; dan
 - prasarana dan sarana minimum untuk sistem jalur sepeda mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; dan
 - Ketentuan umum zonasi untuk ruang terbuka hijau;
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - ruang terbuka hijau;
 - pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 - pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 - jembatan/jalan; dan
 - bangunan sumber daya air, bangunan pengendali banjir, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - kegiatan pengembangan jaringan atau rentangan pipa air minum; dan
 - kegiatan penunjang untuk pariwisata dan pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
- bangunan penunjang objek wisata air;
 - bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 - bangunan pengolahan air limbah;
 - bangunan eksisting; dan
 - pemasangan papan reklame/pengumuman;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 - kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. ketentuan intensitas berupa KDB yang diijinkan 10% (sepuluh) persen, KLB 0,1 (nol koma satu), KDH 90% (sembilan puluh) persen sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;

- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan air yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap sedimentasi dan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air;
 3. bangunan eksisting pada kawasan perlindungan setempat tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman RW meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan untuk fungsi resapan air, olah raga di ruang terbuka dan evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan penunjang ruang terbuka hijau, taman bermain, dan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi RTH.
 4. ketentuan intensitas ruang terbuka hijau rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman RW dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, KLB $\leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan KDH $\geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) persen;
 5. prasarana dan sarana minimum meliputi *pedestrian* dan jalur sepeda yang dilengkapi dengan petunjuk arah dan informasi, jogging track, lampu penerangan dan sarana pelengkap ruang terbuka hijau; dan
 6. ketentuan lain-lain berupa bangunan eksisting pada kawasan ruang terbuka hijau tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan.
 - b. ketentuan umum zonasi pemakaman meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pemakaman, dan bangunan penunjang pemakaman;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat untuk fungsi resapan air;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi pemakaman;
 4. ketentuan intensitas pemakaman dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, KLB $\leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan KDH $\geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) persen; dan
 5. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan setapak, sarana pelengkap pemakaman, dan lampu penerangan.

Pasal 52

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian;
- b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan;
- c. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- d. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata;
- e. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman;
- f. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;
- g. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkantoran;
- h. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi; dan
- i. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan tanaman pangan;
 2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 3. bangunan prasarana penunjang pembangunan ekonomi; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. kegiatan wisata berbasis pertanian (agrowisata);
 3. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional yang menggunakan lahan pertanian tanaman pangan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. bangunan penunjang pertanian;
 5. permukiman eksisting;
 6. kegiatan perikanan budi daya;
 7. kegiatan peternakan skala mikro dan kecil diluar KP2B; dan
 8. pengembangan kawasan permukiman baru pada kawasan tanaman pangan diluar KP2B setelah melalui kajian kelayakan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi yang termasuk dalam KP2B; dan
 2. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang merusak jaringan irigasi.
 - d. ketentuan intensitas di kawasan pertanian dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, KLB $\leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan KDH $\geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) persen dan ketentuan intensitas alih fungsi lahan pertanian maksimum 40% (empat puluh) persen di perkotaan ruas jalan utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).
 - f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 1. perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.
 2. Penyediaan RTH publik pada Kawasan tanaman pangan yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 25% (dua puluh lima persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pertanian lahan basah dan kering;
 2. prasarana penunjang kegiatan hortikultura serta konstruksi jaringan irigasi;
 3. kegiatan perikanan budi daya; dan
 4. kegiatan peternakan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan perumahan dan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada lahan yang layak digunakan untuk perumahan, sedangkan pada lahan yang kurang layak atau mempunyai resiko terkena bencana harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan;
 - 2. permukiman eksisting;
 - 3. pengembangan kawasan permukiman baru.
 - 4. pembuatan bangunan penunjang kegiatan hortikultura; dan
 - 5. kegiatan pariwisata berupa ekowisata khususnya wisata petik sayur-sayuran dan buah-buahan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan terbangun yang merusak jaringan irigasi.
 - d. ketentuan intensitas di kawasan hortikultura dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, KLB $\leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan KDH $\geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) persen dan ketentuan intensitas alih fungsi lahan maksimum 40% (empat puluh) persen di perkotaan ruas jalan utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
 - f. Ketentuan lain-lain meliputi penyediaan RTH publik pada Kawasan hortikultura yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peternakan;
 - 2. penyediaan RTH;
 - 3. permukiman eksisting; dan
 - 4. fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan penunjang peternakan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan diluar peternakan.
 - d. ketentuan intensitas diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - e. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya ikan;
 - 2. permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 3. sarana prasarana penunjang kegiatan budi daya ikan dan kegiatan perikanan lainnya; dan
 - 4. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas; dan
 - 2. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang merusak dan berdampak negatif terhadap kawasan perikanan;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas KDB yang diijinkan 30% (tiga puluh) persen, KLB 0,3 (nol koma tiga) dan KDH 50% (lima puluh) persen;

- e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya; dan
- f. ketentuan lain-lain berupa pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan.

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan industri skala menengah;
 2. kegiatan pergudangan;
 3. kegiatan permukiman eksisting;
 4. kegiatan keagamaan; dan
 5. kegiatan fasilitas penunjang industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman pendukung industri;
 2. kegiatan perkantoran;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan perhotelan;
 5. kegiatan terminal dan stasiun;
 6. kegiatan campuran;
 7. kegiatan pelayanan pendidikan;
 8. kegiatan laboratorium;
 9. kegiatan pelayanan kesehatan;
 10. kegiatan pariwisata;
 11. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 12. kegiatan sistem pengelolaan air limbah; dan
 13. kegiatan sistem jaringan persampahan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak menunjang dengan kegiatan industri; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. ketentuan intensitas KDB yang diijinkan $\leq 60\%$ (kurang dari atau sama dengan enam puluh) persen, KLB $\leq 1,8$ (kurang dari atau sama dengan satu koma delapan) dan KDH $\geq 30\%$ (lebih dari atau sama dengan tiga puluh) persen;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola;
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, sarana pengolahan sampah dan limbah;
 2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, *cottage*, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
 2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan; dan
 3. kegiatan wisata yang memiliki resiko terkena bencana harus dilengkapi dengan kajian lingkungan, studi kelayakan dan mitigasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 2. pengembangan kawasan pariwisata harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
 4. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata;
- d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 60% (enam puluh), KLB 2 (dua) dan KDH 30% (tiga puluh) persen;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
1. penyediaan RTH publik pada kawasan pariwisata,
 2. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 3. penyediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan.
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan pembangunan perumahan;
 3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya
 4. bangunan bersejarah tetap dipertahankan;
 5. kegiatan eksisting industri kecil dan mikro; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pengembangan akomodasi wisata dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;

2. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 3. kegiatan perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 4. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 5. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan;
 6. industri menengah dengan syarat mempunyai instalasi pengolahan limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri;
 7. industri rumah tangga atau industri kreatif dan tidak merupakan industri polutif serta tidak mengganggu lingkungan;
 8. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman; dan
 9. tempat pembuangan sementara atau terpadu;
 10. pergudangan *cold storage* dan ruang penyimpanan barang pendukung kegiatan komersial usaha;
 11. kegiatan peternakan skala mikro dan kecil dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar;
 12. kegiatan perikanan budi daya skala mikro dan kecil dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar;
 13. kegiatan perumahan yang berdekatan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan;
 14. pengembangan kegiatan menara *base transceiver station* (BTS) yang dapat menimbulkan dampak sosial dan/atau dampak lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 15. pengembangan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan perumahan antara lain berupa pengolah limbah dan TPA;
 4. peternakan skala besar;
 5. pengembangan kawasan perumahan yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
- d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun dengan ketentuan KDB maksimum 90% (sembilan puluh) persen, KLB 2 (dua) dan KDH 10% (sepuluh) persen menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang dimuat lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
1. penyediaan RTH publik pada kawasan perumahan baru 10%; dan
 2. penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
1. pada kawasan perumahan yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan perumahan yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan perumahan produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 4. kawasan perumahan yang tidak terlayani oleh PDAM atau sumber air lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui sumur dangkal atau sumur pompa.

- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sarana pejalan kaki, sarana olahraga, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka hijau, dan jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas untuk difabel, toilet, sesuai standar yang berlaku; dan
 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif; dan
 2. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berdekatan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan diluar kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 70% (tujuh puluh) persen, KLB 3 (tiga) dan KDH 25% (dua puluh lima) persen;
 - e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
 - f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 1. pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana; dan
 2. khusus bangunan yang telah ada pada daerah rawan bencana yang menimbulkan kekhawatiran atau mengancam penghuninya, dapat direlokasi.
- (4) ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan berupa TPA meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan RTH;
 - b) pengembangan sarana dan prasarana air limbah;
 - c) pengembangan pengelolaan TPA dengan sistem *controlled landfill*;
 - d) kegiatan pengoperasian TPA berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, pengurugan lapis bersih (*controlled landfill*), pemeliharaan TPA, industri terkait pengelolaan sampah dan kegiatan penunjang operasional TPA; dan
 - e) kegiatan pengolahan sampah menjadi biomassa.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan pariwisata berbasis pengelolaan sampah.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA;
 4. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa infrastruktur dasar pengelolaan TPA.
 5. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 30% (tiga puluh persen), KDB maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan KLB maksimal sebesar 2,1 (dua koma satu).
 6. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) jaringan jalan, penerangan jalan dan tanda atau rambu keselamatan;
 - b) jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
 - c) jaringan drainase; dan
 - d) sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah.
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan berupa gardu listrik terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau, kegiatan pembangunan, pengoperasian, infrastruktur kota dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait, kegiatan pendukung lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan sesuai dengan ketentuan ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional Gardu Listrik; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 4. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan berupa tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan bangunan komersial berdekatan dengan pembangunan hunian;
 2. peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau serta bentang alam; dan
 3. kegiatan perkantoran dan fasilitas umum dan fasilitas sosial eksisting.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan komersial yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki ijin sekitar dan ijin lingkungan; dan
 2. kegiatan perdagangan dan jasa berupa hotel, restaurant/rumah makan, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh, ruang penyimpanan barang pendukung kegiatan komersial usaha, SPBU dan SPBE dengan skala besar harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 90% (sembilan puluh) persen, KLB 9,5 (sembilan koma lima) dan KDH 10% (sepuluh) persen;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. penyediaan parkir sesuai kebutuhan perdagangan dan jasa;
 3. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan perdagangan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;

4. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 5. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- f. ketentuan lain-lain berupa pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana.

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi perdagangan dan jasa tunggal; dan
 2. penyediaan lahan-lahan bagi pengembangan pemukiman pegawai pemerintahan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu lingkungan;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB yang diijinkan $\leq 70\%$ (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh) persen, KLB $\leq 3,5$ (tiga koma lima) dan KDH $\geq 25\%$ (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima) persen;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. penyediaan parkir sesuai kebutuhan perkantoran;
 3. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 4. terpenuhinya jaringan listrik dan air bersih;
 5. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- f. ketentuan lain-lain berupa pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan operasional, sarana dan prasarana penunjang terminal, dan pengembangan kawasan transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang; dan
 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi keamanan dan keselamatan kawasan transportasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan/atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan transportasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 20%, KDB maksimal sebesar 80%, KLB maksimal sebesar 2,4.

- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian disertai tanda atau rambu keselamatan;
 2. jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
 3. jaringan drainase;
 4. sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah;
 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
 6. *shelter* angkutan umum.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengamanan kawasan agar tidak menarik kegiatan masyarakat secara langsung khususnya yang memiliki intensitas kegiatan tinggi; dan
 2. pengadaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan terkait hankam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penambahan kegiatan yang menunjang secara langsung maupun tidak langsung dengan catatan tidak mengganggu fungsi hankam secara keseluruhan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan hankam; dan
 2. zona inti kawasan latihan militer pertahanan dan keamanan merupakan suatu ruang *enclave* atau tertutup dimana terdapat zona penyangga antara kawasan ini dengan kawasan budi daya di sekitarnya.
- d. ketentuan intensitas berupa ketinggian bangunan tidak boleh melebihi kawasan pertahanan dan keamanan;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang hankam yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.

Ketentuan Khusus

Pasal 62

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
 - c. Ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) pada kawasan tanaman pangan, pemakaman dan rimba kota meliputi:

1. tetap mempertahankan fungsinya; dan
 2. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
- b. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) pada kawasan perumahan, meliputi:
1. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 2. tidak membangun dengan ketinggian bangunan melebihi batas maksimum;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara; dan
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat menengah;
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat rendah; dan
 - c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat rendah;
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat menengah pada badan air, kawasan perlindungan setempat, pemakaman, taman kota, rimba kota, kawasan tanaman pangan, dan kawasan hortikultura, meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 2. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi; dan
 3. penerapan konservasi tanah dan air (misal terasering) atau mengatur sistem drainase yang tepat untuk menghindari air hujan yang banyak meresap masuk dan terkumpul pada kawasan yang rawan longsor.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat menengah pada kawasan perumahan, dan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi:
 1. pengendalian bangunan baru dengan boleh menambah bangunan dikawasan yang sudah ada tetapi dilarang memperluas area kawasan;
 2. memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru;
 3. edukasi kepada masyarakat;
 4. penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses;
 5. penguatan daerah tebing; dan
 6. melakukan reboisasi pada kawasan hulu.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah rendah pada badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan budi daya, pemakaman, rimba kota, taman kecamatan, taman kota, dan taman RW meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 2. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
 3. penerapan konservasi tanah dan air (misal terasering) atau mengatur sistem drainase yang tepat untuk menghindari air hujan yang banyak meresap masuk dan terkumpul pada kawasan yang rawan longsor; dan

4. taman kecamatan dan taman RW dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana.
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat rendah pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hortikultura, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan, kawasan infrastruktur perkotaan kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan peternakan, meliputi:
 1. pengendalian bangunan baru dengan boleh menambah bangunan dikawasan yang sudah ada tetapi dilarang memperluas area kawasan;
 2. mengatur sistem drainase yang berupa drainase permukaan untuk mengalirkan air limpasan hujan menjauhi lereng dan drainase bawah permukaan untuk mengurangi tekanan air pori dalam tanah.
 3. pemilihan jenis vegetasi dengan teknik pengelolaan dan pola tanam yang tepat.
 4. memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru;
 5. penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses;
 6. edukasi kepada masyarakat; dan
 7. melakukan reboisasi pada kawasan hulu.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat rendah pada badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan budi daya, pemakaman, rimba kota, taman kecamatan, taman kota, dan taman RW, meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya; dan
 2. taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat rendah pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hortikultura, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan infrastruktur perkotaan dan kawasan peternakan, meliputi:
 1. konstruksi bangunan tahan terhadap gempa;
 2. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 3. pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan kawasan peruntukan industri maka kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi hingga rendah.
- (7) Ketentuan Khusus kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan penunjang pertanian;
 - b. tidak boleh dialihfungsikan;
 - c. dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - e. dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda dan persyaratan tidak diberlakukan.
 - f. penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
 - g. pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peta ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIa, Lampiran XIIb dan Lampiran XIIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 64

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota, dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau

- b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Pasal 65

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi kota; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 - 2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

- (6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Pasal 66

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang berupa sanksi administratif.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 68

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
- a. selama pembangunan;
 - b. pasca pembangunan; dan
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 69

- (1) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 70

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
- (5) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.
- (6) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 72

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Walikota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 73

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 74

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 76

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 77

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan, mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 78

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 79

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PPNS bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penetapan sanksi pidana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
 - c. pemanfaatan ruang yang izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2022-2041

I. UMUM

Perkembangan ruang wilayah Kota Metro mengalami peningkatan aktivitas pergerakan manusia, perkembangan jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Agar kegiatan manusia dapat berlanjut secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan ruang dengan mempertimbangkan aspek kegiatan manusia dan aspek kesediaan ruang.

Kota Metro memiliki posisi geografis yang strategis karena terletak ditengah Provinsi Lampung serta diapit dua kabupaten. Dengan adanya Jalan Tol serta *exit tol* yang dekat dengan Kota Metro menjadikan Kota Metro sebagai titik persinggahan, ditambah dengan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan diharapkan dapat membantu kemudahan akses menuju Kota Metro dan menstimulasi mobilitas di dalam Kota Metro agar semakin meningkat. Kota Metro direncanakan menjadi Kawasan Strategis Metropolitan Bandar Lampung, dengan demikian Kota Metro menjadi Kota Satelit Bandar Lampung. Kota Metro memiliki andil penting dalam jalur transportasi dan aktivitas pergerakan baik barang, manusia dan perkembangan sumber daya manusia.

Pengembangan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan kawasan pariwisata keluarga yang ramah untuk dikunjungi. Dalam mendukung pengembangan rencana tersebut dibutuhkan modal utama yaitu peningkatan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan ekonomi perkotaan di Kota Metro yang bertumpu pada sektor sekunder dan sektor tersier sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bangunan sebagai ruang ekonomi. Melihat kecenderungan tersebut, maka upaya penataan ruang Kota Metro secara signifikan dilakukan dengan mendasarkan pada karakteristik dan daya dukung sehingga akan meningkatkan keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan ekologis di Kota Metro. Upaya pemanfaatan ruang dan pengendalian dalam pengembangan Kota Metro harus sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dan karakteristik wilayah agar tidak salah dalam melaksanakan kegiatan penataan ruang.

Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 dan Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Metro adalah "Mewujudkan Ruang Wilayah Kota Metro Sebagai Kota Berpendidikan, Berbudaya, Sehat, Sejahtera, Produktif yang Terintegrasi dan Berkelanjutan".

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Pusat Pelayanan Kota merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kota

Huruf b

Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan

Huruf c

Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala lingkungan/beberapa kelurahan

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) Nasional adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota provinsi

Huruf b

Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota kabupaten/kota

Huruf c

Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota kabupaten/kota

Huruf d

Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

Ayat (4)

Huruf a

Jalan Lokal Primer adalah jalan menghubungkan secara berdaya guna simpul:

- a. antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-Ling);
- b. antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-Ling);
- c. antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- d. antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-Ling).

Huruf b

Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna:

- a. antara Kawasan Sekunder-I dan perumahan;
- b. antara Kawasan Sekunder-II dan perumahan; dan
- c. antara Kawasan Sekunder-II dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jaringan bergerak satelit yaitu adalah singkatan dari *Base Tranceiver System* (BTS), yaitu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (*influent*) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sistem *controlled landfill* adalah *open dumping* yang diperbaiki atau merupakan sistem pengalihan *open dumping* dan *sanitary landfill* yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu atau sistem penimbunan terkendali.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (5)

Yang dimaksud kegiatan adalah peternakan skala kecil yang diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan berupa satu hamparan.

Pasal 23

Yang dimaksud kegiatan adalah perikanan budidaya skala kecil yang diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan berupa satu hamparan.

Pasal 24

Yang dimaksud kegiatan adalah kegiatan peruntukan industri kecil dan mikro yang diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan berupa satu hamparan.

Pasal 25

Yang dimaksud kegiatan adalah pengembangan kegiatan pariwisata buatan maupun budaya yang diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan berupa satu hamparan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR⁵

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA METRO
 NOMOR : ...¹...TAHUN 2022
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2022-2041

**INDIKASI PROGRAM UTAMA PERWUJUDAN
 RENCANA TATA RUANG KOTA METRO TAHUN 2022-2041 (Periode Lima Tahun Pertama)**

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
A.	Perwujudan Struktur Ruang									
1.	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan									
	1.1 Perwujudan Pusat Pelayanan Kota									
	a) Revitalisasi Taman Merdeka:	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PKP, Dinas LH					
	b) Pengembangan, penataan, dan revitalisasi Kelurahan Metro.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas Kecamatan Metro Pusat					
	c) Pengembangan dan peningkatan kawasan perkotaan pemerintahan.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR					
	d) Penataan dan pengembangan destinasi wisata.	Kelurahan Metro		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Disporapar					
	e) Penataan ruang terbuka hijau (RTH) privat pada kantor pemerintahan.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas LH					
	f) Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) perkantoran.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR dan Dinas PKP					
	g) Pengembangan dan peningkatan Perdagangan tradisional dengan fasilitas Perdagangan modern.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian					
	h) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan,					
	i) Pengembangan dan peningkatan rumah saku/puskesmas.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Kesehatan, Dinas PUTR					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	j) Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang pusat pelayanan kota (PPK)	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas PKP					
	k) Penataanempadan sungai Wey Bumul	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas LH					
	l) Pengembangan prasarana dan sarana pejalan kaki	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dishub					
	m) Pembangunan hidran kebakaran.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, BPBD					
	n) Peruntukan ruang kegiatan sektor informal	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan					
	o) Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, sanitasi)	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas PKP					
	1.1.1 Perwujudan Penunjang Sektor Pusat Pelayanan Kota									
	a) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa.	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Ling Mulyo, Kelurahan Yosorejo		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan					
	b) Pengembangan, penataan dan revitalisasi kelurahan Imopuro.	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Ling Mulyo		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas Perdagangan					
	c) Penataan dan pengembangan destinasi wisata	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Yosorejo		APBD APBN SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Dispersar					
	d) Pengembangan dan peningkatan kawasan perkerbonan pemerintahan.	Kelurahan Imopuro		APBD	Dinas PUTR,					
	e) Penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) privat dan RTH Publik.	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Ling Mulyo, Kelurahan Yosorejo		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP,					
	f) Pengembangan dan peningkatan Perdagangan tradisional dengan fasilitas modern.	Kelurahan Imopuro		APBD Swasta	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.					
	g) Pengembangan dan peningkatan Infrastruktur penunjang pusat pelayanan kota	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Ling Mulyo, Kelurahan Yosorejo		APBD SWASTA	Dinae PUTR,					
	h) Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL)	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Ling Mulyo, Kelurahan Yosorejo		APBD APBN	Dinas PUTR, Dinas LH, Dinas PKP					
	i) Peruntukan ruang kegiatan sektor informal	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Ling Mulyo, Kelurahan Yosorejo		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.					
	j) Pengembangan prasarana dan sarana pejalan kaki	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Ling Mulyo, Kelurahan Yosorejo		APBD	Dinas PUTR, Dishub					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	k) Pembangunan hidran kebakaran.	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Iring Mulyo, Kelurahan Yosorejo.		APBD	Dinas PUTR, Satpol pp, BPBD					
	l) Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainage, sanitasi).	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Iring Mulyo, Kelurahan Yosorejo.		APBD APBN, APBN	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas LH, Dinas Kesehatan, UPT Air Minum.					
	m) Penataan destinasi wisata kuliner sepanjang Jalan Ki Hejar Dewantara	Kelurahan Iring Mulyo		APBD APBN Swasta	Bappeda, Dinas PUTR, Disporapar					
	n) Pengembangan dan penataan Kelurahan Iring Mulyo	Kelurahan Iring Mulyo		APBD Swasta	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.					
	o) Pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan	Kelurahan Iring Mulyo, Kelurahan Yosorejo.		APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan, Dinas PUTR, Dislub					
1.2 Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota										
	a) Penataan dan Peningkatan pelayanan terminal 16 c	Kelurahan Mulyojati		APBD Prov	Dislub Prov					
	b) Penataan dan pengembangan destinasi wisata	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Disporapar					
	c) pengembangan dan peningkatan puskesmas/pusbur.	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur.		APBN APBD APBD	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan.					
	d) peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan insai teknis.	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PUTR, BPSDA, Dinas PUTR, DKP3					
	e) penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi, pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD Swasta.	Dinas PUTR, DKP3, Swasta					
	f) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBN APBD Swasta	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas Perdagangan					
	g) pengembangan dan peningkatan perdagangan tradisional.	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Masayarakat					
	h) pengembangan dan peningkatan infrastruktur sub pusat pelayanan kota.	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur.		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas Perdagangan					
	i) Pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD SWASTA.	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.					
	j) Penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) privat dan RTH Publik	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD SWASTA	Dinas LH, Dinas PUTR, Dinas PKP					
	k) Peruntukan ruang kegiatan sektor informal	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	l) Perbaikan destinasi wisata Tejo Agung (Perdagangan Loka)	Kelurahan Tejo Agung		APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Bappeda, Dinas Perdagangan,					
	m) Revitalisasi pasar perdagangan tradisional	Kelurahan Tejo Agung		APBD	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan					
	n) Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL)	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas LH, Dinas PKP, Dinas Perdagangan					
	o) Pembangunan hidran kebakaran	Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Saipol pp, BPPD					
	1.2.1 Perwujudan Perumahan Sekitar Sub Pusat Pelayanan Kota									
	a) Peningkatan kawasan perdagangan dan jasa sepanjang jalan Sudirman	Kelurahan Ganjar Asri		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Swasta					
	b) Pengembangan Perumahan PNS	Kelurahan Yosodadi		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP, Bappeda					
	c) pengembangan dan peningkatan puskesmas/pustu;	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Mangrove		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan,					
	d) pengembangan pusat perdagangan dan jasa;	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Mangrove		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan,					
	e) pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang Sub Pusat Pelayanan Kota	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosodadi Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Mangrove		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas Perdagangan					
	f) Penelitian dan pengembangan destinasi wisata	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Yosodadi Kelurahan Tejosari		APBN APBD SWASTA	Bappeda, Dinas PUTR, Disporabar, Swasta					
	g) Peruntukan ruang kegiatan sektor informal.	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosodadi Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Mangrove Kelurahan Tejosari		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan,					
	h) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pendidikan;	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosodadi Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Mangrove Kelurahan Tejosari		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,					
	i) peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan litigasi teknis;	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Hadimulyo Barat		APBN APBD Proy	Kementerian PUTR, BPPSDA, Dinas					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
		Kelurahan Ganjar Auri Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Tejosari Kelurahan Yosodadi Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Tejosari		APBD Kota	PUTR, Disparta, Bappelda					
	j) penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi pertanian dan pelestarian yang ramah lingkungan	Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Tejosari		APBD SWASTA	Disparta, Masyarakat					
	k) Pengembangan dan peningkatan pasar tradisional	Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Mangrovejo Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Mangrovejo Kelurahan Tejosari		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Masyarakat					
	l) peningkatan jalan lingkungan.	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Mangrovejo Kelurahan Tejosari		APBD	Dinas PUTR.					
	m) Pematian dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan RTH Privat maupun RTH Publik.	Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Mangrovejo Kelurahan Tejosari		APBD, Swasta.	Dinas LH, Dinas PUTR, Dinas PKP					
	1.3. Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi Kelurahan Purwosari, Kelurahan Mulyosari, Kelurahan Mangodadi, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Banjarsari dan Penunjang sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi Kelurahan Sumberasri Banul, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Purwosari									
	a) Peningkatan dan Pemeliharaan Higasi Teknis	Sepanjang rigasi teknis		APBN APBD	Kementerian PUTR, Dinas PUTR, DKP3					
	b) Pengembangan Tanaman Padi	Kelurahan Karangrejo Kelurahan Purwosari Kelurahan Purwosari Kelurahan Rejomulyo Kelurahan Banjarsari Kelurahan Karangrejo Kelurahan Mangodadi Kelurahan Purwosari		APBN APBD SWASTA	DKP3, Masyarakat					
	c) Pengembangan Pemukiman dan Perikanan.	Kelurahan Karangrejo Kelurahan Purwosari Kelurahan Mangodadi Kelurahan Purwosari		APBN APBD SWASTA	DKP3, Masyarakat					
	d) Pengembangan dan Peningkatan Perdagangan Tradisional.	Pusat Pelayanan Lingkungan dan sekitarnya		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.					
	e) Peningkatan Jalan Lingkungan.	Pusat Pelayanan Lingkungan dan sekitarnya		APBN, APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	a) rencana jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api umum antar-kota b) Metro-Sukadana	a. Rejosari-Metro; dan b. Metro-Sukadana		APBD Prov	Dishub Prov,					
3.	Pengembangan Sistem Jaringan Energi 3.1 Pengembangan Jaringan Infrastruktur tenaga listrik dan sarana pendukungnya a) Peningkatan pasokan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik perkotaan. b) Pengembangan Sakuran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv. c) Pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	Kota Metro Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan transmisi Tegangan menuju Metro dan menuju Sribaworo. 1. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) melalui seluruh jalan kolektor dan jalan lokal; dan 2. Saluran udara tegangan rendah (SUTR) melalui seluruh wilayah kota. Jaringan distribusi Tenaga Listrik di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.		APBN, APBD, BUMN, SWASTA APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT. PLN PT. PLN					
	3.2 Pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik			APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT. PLN					
	3.3 Pengembangan energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya, angin dan biogas.	Kota Metro		APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT. PLN					
	3.4 Peningkatan cakupan pelayanan listrik di seluruh wilayah Kota Metro, dengan target pelayanan (100%) pada tahun 2041.	Kota Metro		APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT. PLN					
	a) Pemenuhan kebutuhan energi listrik oleh PT. PLN. b) Rencana pengembangan jaringan pipa gas bumi terdiri dari jaringan utama yang berasal dari jaringan distribusi melalui Kota Metro-Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan	Kota Metro Kota Metro		APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT. PLN					
4.	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi a) Pengembangan jaringan tetap berupa optimalisasi jaringan serat optik b) Pengembangan infrastruktur jaringan tetap c) Pengembangan Jaringan telekomunikasi bergerak berupa lokasi dimana telekomunikasi termasuk merantai Base Transceiver Station (BTS) bersama dan jaringan serat optik.	Kota Metro Berupa optimalisasi salur dan lokasi sentral telekomunikasi di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat. Kota Metro		APBD, BUMN, SWASTA APBD, BUMN, SWASTA APBD, BUMN, SWASTA	Telkom, Swasta Telkom, Swasta Telkom, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	d) Pengembangan Kota Cerdas (Smart City) berupa CCTV, Webcam dan pemastian jaringan data	Kota Metro		APBD, BUMN, SWASTA	Telkom, Swasta					
5.	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
	5.1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi									
	a) Pengembangan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi (O.1)	D.1 Way Sekampung		APBN, APBD Prov, APBD Kota, SWASTA	Kementerian PUTR, Dinas PUTR, BPSDA					
	b) Pengembangan jaringan irigasi, pengalihan air baku serta pengendalian banjir.	Kota Metro.		APBN, APBD Prov, APBD Kota, SWASTA	Kementerian PUTR, Dinas PUTR, BPSDA					
	5.2 Pengembangan sistem pengendalian banjir									
	a) Normalisasi dan pemeliharaan Dam/Waduk Raman.	Kelurahan Purwasri		APBN, APBD	Dinas PUTR					
	b) Menetapkan garis sempadan sungai sepanjang aliran anak Sungai Way Raman, Sungai Way Sekampung, Sungai Way Batanghari dan Sungai Way Burnt.	Sepanjang sungai		APBN, APBD	Dinas PUTR					
	c) Normalisasi sepanjang sungai Way Raman, sepanjang aliran anak sungai Way Sekampung, Way Batanghari dan anak sungai Way Burnt.	Sepanjang sungai		APBN, APBD	APBN, APBD					
	5.3 Bangunan Sumber Daya Air									
6.	Pengembangan Infrastruktur Perkotaan									
	6.1 Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
	a) Pengembangan sistem pengolahan air minum (SPAM) Regional	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Perwakilan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas PUTR, dan Masyarakat					
	b) Pengembangan unit air baku	Water Treatment Plant (WTP) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan.		APBN, APBD, SWASTA, BUMN	Dinas PUTR, PDAM, Swasta					
	c) Pengembangan unit air produksi	Instalasi Pengolahan Air yang terdapat di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan		APBN, APBD, SWASTA, BUMN	Dinas PUTR, PDAM, Swasta					
	d) Pengembangan jaringan produksi	Kelurahan Rejomulyo Kelurahan Merpodadi Kelurahan Mangroveja Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Iring Mulyo Kelurahan Yosodadi		APBN, APBD, SWASTA, BUMN	Dinas PUTR, PDAM, Swasta					
	e) Pengembangan unit distribusi	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.		APBN, APBD, SWASTA, BUMN	Dinas PUTR, PDAM, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	6.1.1 Pengembangan bukan jaringan perpipaan									
	Pengembangan sumbu pompa	Kelurahan Metro Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Iling Mulyo Kelurahan Yosodadi Kelurahan Geger Agung Kelurahan Geger Asri		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, PDAM, Swasta					
	6.2 Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL)									
	a) Pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Kecamatan Metro Utara.		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR					
	b) Revitalisasi dan peningkatan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)	Kecamatan Metro Utara.		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR					
	c) Pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR					
	6.3 Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3									
	a) Infrastruktur sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3)	Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Geger Asri Kelurahan Malayati Kelurahan Metro		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas LH, Dinas Kesehatan					
	b) Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) kecuali kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemantauan, pemanfaatan ulang dan pengolahan oleh pihak ketiga	Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Timur.		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas LH, Dinas Kesehatan					
	6.4 Pengembangan sistem jaringan persampahan									
	a) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS) pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan.	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas LH					
	b) revitalisasi dan rencana pemenuhan luas tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Karangrejo dengan sistem controlled landfill.	TPA Karangrejo di Kecamatan Metro Utara.		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas LH, Bappeda					
	c) rencana pembangunan Pusat Daur Ulang-PDU (recycling center)	Kelurahan Rejomulyo		APBN APBD	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas LH, Dinas PUTR					
	d) infrastruktur tempat pemrosesan (TPSSR)	Kelurahan Sumbensari Bantui		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas LH					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	e) mencari pengembangan tempat peristirahatan persampulakan masyarakat reuse, reduce, recycle (TP3SR)	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas LH, Bappeda					
	6.5 perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana									
	a) Peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana.	Jalan Abri, Jalan AH. Nasution, Jalan Arwana, Jalan Budi Utomo, Jalan Cempeka, Jalan Dr. Soetomo, Jalan Imani Bonjol, Jalan Kacer, Jalan Kenanga, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Krakatau, Jalan Mayend, Ryachudi, Jalan Mujair, Jalan Palimura, Jalan Salak, Jalan Selung, Jalan Subur, Jalan Tengir, Jalan Tongkol, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan WR. Supratman, Jalan Yos Sudarso, Jalan Adipati Raya, Jalan Madukoro, Jalan Stadion Tejosari, dan Jalan Tenggit.		APBN, APBD	Dinas PUTR, BPBD					
	b) Penyediaan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Barat		APBN, APBD	Dinas PUTR, BPBD					
	c) Pengembangan dan perencanaan ruang-ruang evakuasi bagi korban bencana alam dan non alam	Kota Metro		APBD	BPBD Dinas PUTR					
	d) Peningkatan prasarana dan sarana pengangkutan	Kota Metro		APBD	BPBD Dinas PUTR					
	e) Pemasangan rambu-rambu (signage) jalur evakuasi dan papan informasi bencana	Kota Metro		APBD, APBN	Dinas PUTR, BPBD, Ditrib					
	f) Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Metro		APBD	Dinas PUTR					
	g) Rencana pengembangan sistem proteksi kebakaran, alat pemadam kebakaran atau pengembangan jaringan fire hydrant guna pencegahan dan pengurangan biaya kebakaran	Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat Mulyosari, Kantor Camat Metro Timur, Kantor Camat Metro Selatan		APBD	Dinas PUTR					
	6.6 perwujudan sistem jaringan drainase									
	a) Peningkatan kualitas jaringan drainase primer	1) Sungai Way Raman dan Anak Sungai Way Raman 2) Sungai Way Sekampung dan Anak Sungai Way Sekampung 3) Sungai Way Bunut dan Anak Sungai Way Bunut 4) Sungai Way Batanghari dan Anak Sungai Way Belanghari		APBN, APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP					
	b) Pengembangan jaringan drainase sekunder	saluran drainase sekunder meliputi selok, rusak jalan kolektor dan lokal yang berada di Kota Metro.		APBN, APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	a) Penataan dan pemeliharaan kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Timur	84 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas LH					
	b) Identifikasi dan Penataan Kawasan Sepanjang Sempadan Sungai	Sepanjang sungai		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas LH					
	c) Pengembangan anak sungai Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, dan penataan, pemeliharaan kawasan sempadan sungai di Kota Metro.	Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Selatan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas LH					
	d) Pengembangan Program Konservasi Pada Kawasan Lindung	Kecamatan Metro Utara dan Metro Selatan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Dinas PUTR					
	e) Program Peningkatan Pengawasan Perizinan Pada Kawasan Lindung	Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Kantor Perizinan					
	f) Penerapan Pola Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan Lindung	Kecamatan Metro Utara dan Metro Selatan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Kantor Perizinan					
	g) Melakukan Reboisasi pada lahan-lahan kritis	Kecamatan Metro Utara dan Metro Selatan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR					
	h) Identifikasi dan Penataan Kawasan Bencana Banjir	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BIPBD					
	i) Rehabilitasi dan Reboisasi Kawasan Hulu dan DAS	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas LH					
	j) Sosialisasi Teknik Miligasi Banjir kepada masyarakat terdampak	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BIPBD, Dinas PUTR					
	k) Pengembangan dan Peningkatan Embung serta Biopori Kota	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUTR, Dinas PUTR					
	l) Pengembangan dan perbaikan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran primer.	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR					

No	Program Utama	Lokal	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						2022	2023	2024	2025	2026	
	m) Pengembangan RTH sebagai daerah tangkapan air/resapan air	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PUTR, Dinas PKP						
	1.2 Perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau										
	a) Pengembangan Rimba Kota	Kelurahan Garjati Agung Kelurahan Purwanti Kelurahan Sumberani Barui Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Tepasari Kelurahan Garjati Asri	40 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PKP						
	b) Pengembangan Taman Kota	Kelurahan Banjarani Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Imopuro Kelurahan Iing Mulyo Kelurahan Karangrejo Kelurahan Margorejo Kelurahan Metro Kecamatan Kelurahan Mulyojati Kelurahan Rejomulyo Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat	23 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PKP						
	c) Pengembangan taman kecamatan	Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Iing Mulyo Kelurahan Margorejo Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Yosorejo Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Imopuro Kelurahan Margorejo Kelurahan Metro Kelurahan Yosodadi Kelurahan Mulyojati Kelurahan Yosorejo	3 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PKP						
	d) Penyediaan Taman RW	Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Pusat.	2 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PKP						
	e) Pengembangan pemukiman eksisting dan rencana penyediaan pemukiman baru	Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Pusat.	27 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PUTR, Bappeda, Disperpar						
	f) Pengembangan RTH dengan memanfaatkan potensi RTH (sempadan sungai, sempadan jalan dan irigasi)	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR,						
	g) Pengembangan RTH jalur hijau di sepanjang jalan kolektor, lokal, hingga jalan lingkungan	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR,						
	h) Pengembangan perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR,						

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	l) Penyediaan RTH kawasan pertukaran industri	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Swasta					
	j) Penyediaan RTH Kawasan Perumahan	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP, Swasta					
	k) Penyediaan RTH Privat dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan atau penutup tanah/rumput.	Kota Metro		SWASTA	Masyarakat					
	l) Penyediaan RTH pada Kawasan Pertanian yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP, Swasta					
	m) Penyediaan RTH Publik di lahan aset pemerintah Kota Metro	Kota Metro		APBN, APBD	Dinas LH, Dinas PKP, BHKAD					
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya.									
	2.1 Perwujudan Kawasan Pertanian									
	a) Inventarisasi dan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kota Metro	1.568 Ha	APBN, APBD, SWASTA	DKP3					
	b) Peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan pada kawasan tanaman pangan	Kota Metro	3.524 Ha	APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat					
	c) Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakht dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakht	Kota Metro		APBN, APBD	Kementerian PUTR, DKP3, Dinas PUTR, BPSDA					
	d) Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, DKP3					
	e) Perwujudan kawasan hortikultura	Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Selatan	46 Ha	APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat					
	f) Perwujudan kawasan peternakan	Kecamatan Metro Utara	3 Ha	APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat					
	g) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian menjadi produk-produk olahan pakan yang mempunyai nilai tambah.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3					
	h) Penetapan komoditas unggulan peternakan sesuai karakteristik sub kawasan.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3					
	i) Penetapan kawasan dan sentra budidaya peternakan untuk Kota Metro.	Kelurahan Imopuro, Kelurahan Metro, Kelurahan Ganjar Asri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Yosomulyo		APBN, APBD, SWASTA	DKP3					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						2022	2023	2024	2025	2026	
	1) Rahoana pengembangan kegiatan peternakan skala kecil di Kota Metro	tersebar diseluruh Kecamatan Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat						
	k) Penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi ternak	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat						
	l) Penguatan kelembagaan petani terkait dengan budidaya ternak, pengangkutan dan pemasaran serta pemodalan	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3						
	2.2 Perwujudan Kawasan Perikanan										
	a) Pengembangan kawasan perikanan budidaya	Kelurahan Karangrejo	2 Ha	APBN, APBD, SWASTA	DKP3						
	b) Penetapan kawasan dan sentra budidaya ikan air tawar di Sebagian Kecamatan Kota Metro	Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Utara		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat						
	c) Penetapan kawasan pengolahan perikanan budidaya dan gurnam di Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Utara	Kelurahan Mangoddi Kelurahan Purwasari		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat						
	d) Rencana pengembangan kegiatan perikanan budidaya skala kecil di Kota Metro	tersebar diseluruh Kecamatan Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat						
	e) Penetapan komoditas unggulan perikanan sesuai karakteristik kawasan	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3						
	f) Penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi ikan.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat						
	g) Pengembangan budidaya perikanan pola mina padi.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat						
	h) Penguatan kelembagaan petani terkait dengan budidaya ikan, pengangkutan, pemasaran dan pemodalan	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Dinas Perdagangan, Masyarakat						
	2.3 Perwujudan Kawasan Perikanan Industri										
	a) Pengembangan kawasan perikanan Industri (KPI)	Kecamatan Metro Utara	33 Ha	APBN, APBD, SWASTA	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMK, UMI dan Perindustrian, Swasta						
	b) Pengembangan Industri kecil dan mikro/umah tangga seperti sentra home industri yang diarahkan pada kawasan peternakan untuk memacu pertumbuhan perekonomian secara terpadu dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan ketersediaan fasilitas pelayanan publik	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMK, UMI dan Perindustrian, Masyarakat						
	c) pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil, industri menengah dan kejuruan, sehingga dapat memperbaiki pondasi perekonomian	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas Koperasi, UMK, UMI dan Perindustrian, Masyarakat						

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						2022	2023	2024	2025	2026	
	d) Pengembangan kawasan industri terpusat.	Kecamatan Metro Utara		APBN, APBD, SWASTA	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Swasta						
	2.4 Perwujudan Kawasan Pariwisata										
	a) Perwujudan Kawasan Pariwisata	Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara	4 Ha	Swasta	Swasta						
	b) Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya terdiri dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) di Kota Metro	Kota Metro		APBN, APBD Priv, dar/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi						
	c) Pengembangan obyek-obyek wisata kota di Kota Metro yang berpotensi untuk dikembangkan seperti wisata capri usang, sekitar dan raman, sambilan, Bantul, wisata rekreasi, wisata berbelanja, wisata kuliner, wisata hiburan dan lain-lain.	Kota Metro		APBN, APBD, dar/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta						
	d) Pengembangan akomodasi wisata misanya hotel, penginapan, bank, money changer, biro perjalanan, rumah makan/restaurant, pusat-pusat perdagangan dan penunjang lainnya.	Kota Metro		APBN, APBD, dar/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta						
	e) Melakukan promosi wisata kalanya dengan obyek wisata yang akan dikembangkan di Kota Metro, maupun obyek-obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro.	Kota Metro		APBN, APBD, dar/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta						
	f) Pengembangan paket-paket wisata yang dikaitkan dengan Kota Metro dan obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro..	Kota Metro		APBN, APBD, dar/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta						
	g) Parada budaya Kota Metro dan sekitarnya dengan rute sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder	Kota Metro		APBD, dar/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta						
	h) Perencanaan dan pembangunan 3 (tiga) destinasi wisata potensial di Kota Metro: <ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi Taman Merdeka Penataan Taman Wisata Bumi Perumahan Sumbarsari Baru Perencanaan dan pembangunan destinasi wisata sekitar Dam Rannan 	Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Utara		APBN, APBD, dar/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta						
	i) Pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolatan ekowisata.	Kecamatan Metro Utara		APBD, dar/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta						
	j) Perencanaan kawasan ekowisata secara partisipatif.	Kecamatan Metro Utara		APBD, dar/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta						

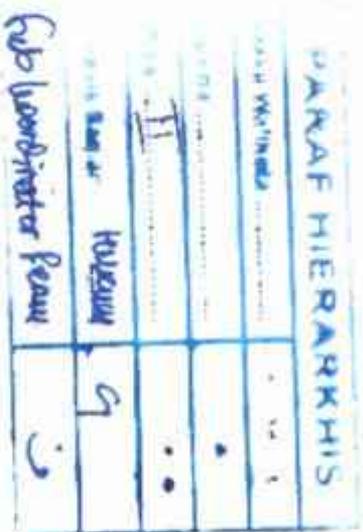
No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
k)	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata dalam bentuk pelatihan kader ekowisata di desa yang masuk kawasan penyangga.	Kecamatan Metro Utara		APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta					
l)	Pengembangan kegiatan pariwisata lainnya (alam, buatan dan wisata budaya) di Kota Metro	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro								
2.5 Perwujudan Kawasan Permukiman										
a)	Pemetaan kawasan perumahan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kota	Kota Metro		APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP					
b)	Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas kawasan perumahan	Kota Metro		APBD, APBN	Dinas PKP					
c)	Pengembangan sistem pengolahan air limbah di kawasan perumahan	Kota Metro		APBD, APBD	Dinas PUTR, Dinas LH					
d)	Peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan	Kota Metro		APBD	Dinas Kesehatan, Dinas LH					
e)	Pengembangan Perumahan PNS di Kecamatan Metro Utara	Kecamatan Metro Utara		APBD, APBN	Dinas PKP					
f)	Pengembangan Rumahkita pada kawasan kumuh perkotaan	Kota Metro		APBD, APBN, SWASTA	Dinas PKP, Swasta					
g)	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan hunian untuk memenuhi kebutuhan penduduk sesuai dengan arahan penyediannya dilaksanakan dengan pengembangan kawasan baru atau menambah kapasitas kawasan yang sudah tersedia dengan arahan pembangunan secara vertikal.	Kota Metro		APBD, APBN, SWASTA	Dinas Kesehatan, Disporapar, Dinas PUTR, Dinas PKP					
h)	pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan dan/atau perumahan komersial	Kota Metro		SWASTA	SWASTA					
i)	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Metro	Kota Metro		APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP					
j)	pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional	Kota Metro		APBD, APBN, SWASTA	Dinas Kesehatan					
k)	pengembangan pusat pelayanan skala lokal yaitu Puskesmas, Pustu dan Klinik Bersalin di seluruh Kecamatan.	Kota Metro,		APBD, APBN, Swasta	Dinas Kesehatan					
l)	pengembangan pusat pelayanan perbatasan skala kota dan regional di Kecamatan Metro Pusat	Kecamatan Metro Pusat		APBD, APBN, Swasta	Dinas PUTR, Dinas Sosial					
m)	Pengembangan pusat pelayanan perbatasan skala lokal di seluruh Kecamatan	Kota Metro		APBD, APBN, Swasta	Dinas PUTR, Dinas Sosial					
n)	pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum & fasilitas sosial (kawasan pendidikan, kesehatan, olahraga dan	Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara		APBD, APBN, Swasta	Dinas Kesehatan, Disporapar,					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						2022	2023	2024	2025	2026	
	perbadatan) untuk memenuhi kebutuhan penduduk sesuai dengan arahan penyediaannya dilaksanakan dengan pengembangan kawasan baru atau memambah kapasitas kawasan yang sudah tersedia dengan arahan pembangunan secara vertikal	Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Pusat			Dinas PUTR, Dinas PKP						
	o) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan	Kelurahan Tejosari Kelurahan Karangrejo		APBD, APBN, Swasta	Dinas PUTR, Dinas LH, PT, PLN						
	p) pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga yang dipertaras dikembangkan pada setiap pusat lingkungan serta pada kawasan oleh raga di Kelurahan Tejosari.	Kota Metro		APBN APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Disporipar						
	q) pengembangan sarana parkir yang diperkeras.	Kecamatan Metro Pusat		APBN APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan						
	2.6 Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa										
	a) perbaikan kawasan perdagangan dan jasa	a. Kecamatan Metro Barat, b. Kecamatan Metro Pusat, c. Kecamatan Metro Timur	145 Ha	APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan						
	b) pengembangan pusat perdagangan dan jasa pada setiap pusat pelayanan.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Diakhub						
	c) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR Diakhub						
	d) Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di sekitar Jalan Sudirman, Jalan A.H.Nasution, Jalan Ahmad Yani, Jalan K.H. Maja Dewantara, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pattimura, sedangkan Kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan berada di sekitar kawasan permukiman atau kawasan lainnya	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR Diakhub, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Swasta						
	e) penataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki.	Kota Metro		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Diakhub						
	f) Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana kegiatan sektor Informal Pedagang Kota Lima.	Kota Metro		APBD, APBN	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.						
	g) Pengaturan lokasi dan waktu berdagang bagi pedagang kaki lima.	Kota Metro		APBD, APBN	Dinas Perdagangan.						
	h) Peningkatan kualitas dengan perusahaan sektor formal dalam penyediaan lokasi PKL	Kota Metro		APBD, APBN, Swasta	Dinas Perdagangan dan Diskopem						
	2.7 Perwujudan Kawasan Perkantoran										
	a) Penataan kawasan perkantoran	Kelurahan Imopuro Kelurahan Metro Kelurahan Yosorejo	19 Ha	APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR						
	b) Studi kelayakan pada kawasan perkantoran yang telah direncanakan.	Kota Metro		APBD	Dinas PUTR						

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	c) Pengembangan kawasan perkerentan baru	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR					
	d) Mengembangkan kawasan perkerentan pemerintahan di sekitar Jalan Sudirman, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Jend. AH. Nasution dan Jalan Alamsyah Ratu Prawiraningrat. Sedangkan kawasan perkerentan swasta berlokasi di kawasan perkerentan dan jasa serta di kawasan permukiman atau kawasan lainnya.	Kota Metro		APBD, APBN, SWASTA	Dinas PUTR, Swasta					
	e) Pengembangan fasilitas perkerentan yang lokasinya menyebar diarahkan untuk dipindahkan/lokalisasi di kawasan yang telah direncanakan.	Kota Metro		APBD, APBN, SWASTA	Dinas PUTR					
	f) rencana pengembangan kawasan perkerentan yang tersebar diseluruh Kecamatan Kota Metro	Kota Metro								
	2.8 Perwujudan Kawasan Transportasi									
	a) pengembangan kawasan transportasi berupa pemeliharaan dan pengembangan terminal perumpang	Kecamatan Metro Barat	1,3 Ha	APBD Prov	Dishub Prov					
	b) pengembangan kawasan transportasi berupa terminal perumpang dan barang	a) pengembangan terminal tipe C Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat b) pengembangan terminal barang Kelurahan Telo Agung Kecamatan Metro Timur dan c) Rencana peningkatan terminal barang Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.		APBD, APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dishub					
	2.9 Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
	a) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1) Komando Distrik Militer (KODIM) 0411/KM berada di Kelurahan Hadinulyo Barat Kecamatan Metro Pusat 2) Komando Rayon Militer (Koramil) 01 Metro Pusat berada di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur 3) Komando Rayon Militer (Koramil) 02 Metro Utara berada di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara, 4) Komando Rayon Militer (Koramil) 03 Metro Selatan berada di Kelurahan Mangrove Kecamatan Metro Selatan 5) Kepolisian Resor (POLRES) berada di Kecamatan Metro Pusat dan 6) Polisi Sektor (Polsek) yang tersebar di setiap Kecamatan.	5 Ha	APBN, APBD	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, TMUPoh					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan perikanan dan keamanan	Kota Metro		APBN, APBD	Kementerian Perikanan dan Kelautan, TNI/Polri					
C.	1. Penataan Kawasan Strategis 1. Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi									
	a) Kawasan strategis perdagangan dan jasa pusat kota	Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Timur		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Swasta					
	b) Rencana pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya di Kota Metro	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Swasta					
	c) Penataan dan pemertanian kawasan komersil	Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Timur		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan					
	d) Kawasan strategis peruntukan industri dan pengembangan kegiatan perdagangan	Kecamatan Metro Utara		APBN APBD darivatau sumber lain yang sah	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Swasta					
	e) Rencana pengembangan kegiatan industri kecil dan mikro lainnya di Kota Metro	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN APBD darivatau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Masyarakat					
	f) Pengembangan dan pembangunan kawasan strategis pariwisata	Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara		SWASTA	Swasta					
	g) Pengembangan kegiatan dan destinasi pariwisata lainnya berupa wisata alam dan wisata buatan	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN APBD darivatau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Disporpar Swasta					
	h) penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.	Kota Metro.		APBN APBD darivatau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Disporapar Swasta					
	2. Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.									
	a) Pengembangan kawasan strategis pendidikan dengan kriteria kawasan Pendidikan tinggi berbasis potensi lokal dengan skala pelayanan kota dan regional	Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Barat		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda					
	b) Pengembangan zona dan kegiatan pendidikan di Kota Metro	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda					

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
						2022	2023	2024	2025	2026
	e) Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas kawasan pendidikan	Kota Metro		APBN APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR					
	d) Pengembangan kawasan strategis kesehatan dengan kriteria kawasan strategis kesehatan skala pelayanan kota dan regional	Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Barat		APBN APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan					
	e) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan kesehatan dan rencana pengembangan kegiatan kesehatan di Kota Metro	terserbar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan					
	f) Kawasan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS), Menara Masjid Taqwa dan Rumah Bersalin Santa Maria	Kecamatan Metro Pusat		APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dispropar, Dinas Kesehatan					



WALIKOTA METRO,
dto
WAHDI

